

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	.....
Media Online	Muria News

Wilayah: Kabupaten Jepara

## Silpa APBD 2021 Jepara Capai Rp71,28 Milyar

<https://www.murianews.com/amp/2022/06/30/298854/silpa-apbd-2021-jepara-capai-rp-7128-milyar>

**MURIANEWS, Jepara** – Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) 2021 Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terdapat Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 71,28 miliar.

Kelebihan anggaran itu dipicu dari meningkatnya jumlah pendapatan dari sejumlah sumber. Itu diungkapkan Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta.

"Jadi APBD kita tahun 2021 mengalami Silpa sekitar Rp 71,28 milyar," kata saat membacakan pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dalam sidang paripurna DPRD Jepara, Kamis (30/6/2022).

Edy menjelaskan, pos pendapatan daerah Kabupaten Jepara pada 2021 mencapai Rp 2,38 triliun. Jumlah itu melebihi target yang hanya Rp 2,33 triliun. Capaian itu setara dengan 101,86 persen dari target.

Sementara, pembelanjaan daerah hanya terealisasi sekitar Rp 2,3 triliun atau 91,1 persen dari target. Di mana, target pembelanjaan daerah ditarget mencapai Rp 2,53 triliun.

"Selisih pendapatan dan belanja daerah itu menyebabkan APBD Kabupaten Jepara tahun anggaran 2021 mengalami Silpa sebesar Rp71,28 miliar. Di luar itu, masih terdapat pembiayaan netto sebesar Rp197,9 miliar," jelas Edy.

Pembiayaan netto itu dikarenakan pada APBD 2021 mendapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp 209,48 miliar. Dari jumlah itu digunakan untuk pembiayaan daerah hanya sebesar Rp 11,57 miliar.

Di kesempatan itu, Edy juga melaporkan keberhasilan Pemkab Jepara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Keberhasilan itu, lanjutnya, merupakan buah kerja keras dan kerja bersama dari berbagai unsur. Edy pun menyampaikan terima kasih kepada bupati periode 2017-2022, forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat.

"Alhamdulillah, kita kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang tahun ini merupakan kedua belas berturut-turut," tandas dia.

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH